

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2020 Indonesia memiliki pulau sebanyak 16.771 pulau yang tercatat pada Gazeter Republik Indonesia, sedangkan pada tahun 2021 pulau di Indonesia bertambah sebanyak 299 pulau sehingga Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.000 pulau (Badan Informasi Geospasial, 2021). Indonesia memiliki 5 provinsi dengan jumlah pulau terbanyak (BPS, 2019), posisi pertama sebesar 4.108 pulau di Papua Barat, melampaui yang dimiliki Kepulauan Riau (1.994 pulau), Sulawesi Tengah (1.632 pulau), Maluku (1.286 pulau), dan Maluku Utara (856 pulau). Dapat dikatakan bahwasanya Provinsi Kepulauan Riau terletak posisi ke-2 yang memiliki banyak pulau. Secara geografis Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang memiliki luas wilayah 251.810,71 km² dengan 96% adalah perairan dan 4% adalah daratan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2002 Nomor 111 Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai provinsi di Indonesia dengan memiliki 4 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, serta Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Sejak tahun 2008, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 terbentuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai hasil pemecahan wilayah Kabupaten Natuna.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019, luas wilayah masing-masing kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau, yaitu: Karimun (912,75 Km²), Bintan (1.318,21 Km²), Natuna (2.009,04 Km²), Lingga (2.266,77 Km²), Kepulauan Anambas (590,14 Km²) Kota Batam (960,25 Km²) Kota Tanjungpinang (144,56 Km²).

Dengan adanya lima kabupaten dan dua kota di Kepulauan Riau, tentunya diperlukan pengawasan kapal-kapal masuk atau berkunjung ke wilayah Kepulauan Riau tersebut. Maka dari itu diperlukan penempatan petugas guna menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan maritim di daerah Kepulauan Riau ini yaitu bernama Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjungpinang. Selain itu, dengan adanya sarana bantu Navigasi pelayaran yang dapat menentukan arah dan pengambilan posisi yang baik bagi setiap pelayaran pada kapal-kapal. Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjungpinang sebagai instansi pemerintah dibawah naungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Dimana pemasukan yang diperoleh dari mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam

APBN atau APBD. Laporan keuangan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual adalah laporan yang berstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2010 laporan keuangan pokok terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (Laporan Perubahan SAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di sektor publik akan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah daerah. Apabila dalam sebuah instansi pemerintahan memiliki kualitas sumber daya manusia yang handal serta didukung oleh teknologi informasi mampu menjadikan modal awal dalam menunjang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjungpinang telah melaporkan laporan keuangan merujuk pada peraturan tersebut. Namun, penyajian laporan keuangan apakah telah mengikuti atau belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual belum diketahui benar adanya secara pasti, sehingga perlu dilakukannya penelitian ini. Dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan penyajian neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjungpinang tahun 2018 dan melihat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah yaitu didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 8 terdapat beberapa akun yaitu pendapatan, beban, aset utang dan ekuitas kemudian setelah peneliti menemukan penelitian secara langsung ke lapangan terjadi ketidaksesuaian salah satu akunnya yaitu aset yang mana terletak pada tahun 2019-2020 dapat dilihat untuk laporan realisasi anggaran nya untuk pendapatan dan belanja menurun dan juga laporan operasional pada pendapatan juga menurun namun untuk di neraca menimbulkan nilai aset yang meningkat secara signifikan. Kemudian laporan keuangan 2019 masih banyak kesalahan dalam menulis angka dan belum di ubah walaupun sudah diaudit.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian penerapan basis akrual secara penuh yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyajian laporan keuangan Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjungpinang?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan pada penyajian laporan keuangan Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjungpinang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 8?

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat agar tidak terjadinya pembahasan yang berlarian dan menyimpang, serta perluasan rumusan masalah

dari yang seharusnya. Maka, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilaksanakan di Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjungpinang
2. Penelitian ini hanya berfokus pada laporan keuangan akhir tahun.
3. Penelitian ini menggunakan data instansi Dinas Navigasi kelas 1 Tanjungpinang untuk tahun 2018-2020.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan basis akrual secara penuh yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyajian laporan keuangan Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan pada penyajian laporan keuangan Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjungpinang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 8.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Bermanfaat untuk dijadikan sebagai referensi yang digunakan oleh peneliti selanjutnya.
2. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan Studi di Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Sebagai referensi yang dapat digunakan oleh pihak distrik Navigasi kelas 1 Tanjungpinang.

1.7 Sistematika Penelitian

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, diharapkan dapat menjadi tinjauan dan memberikan kemudahan bagi pembaca untuk memahami secara komprehensif apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang disusun secara sistematis, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan teori-teori yang relevan dengan topik dan ruang lingkup penelitian, konsep dari hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai kajian pustaka, serta terdapat kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini terdiri dari objek dan ruang lingkup penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, teknik penentuan populasi dan sampel, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini mendeskripsikan hasil analisis/ observasi dan hasil analisis dengan metode tertentu dan mengaitkan dengan teori yang relevan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini membahas tentang deskripsi hasil penelitian yang menjawab secara sistematis tujuan penelitian dan berisikan saran serta masukan dari penulis.

